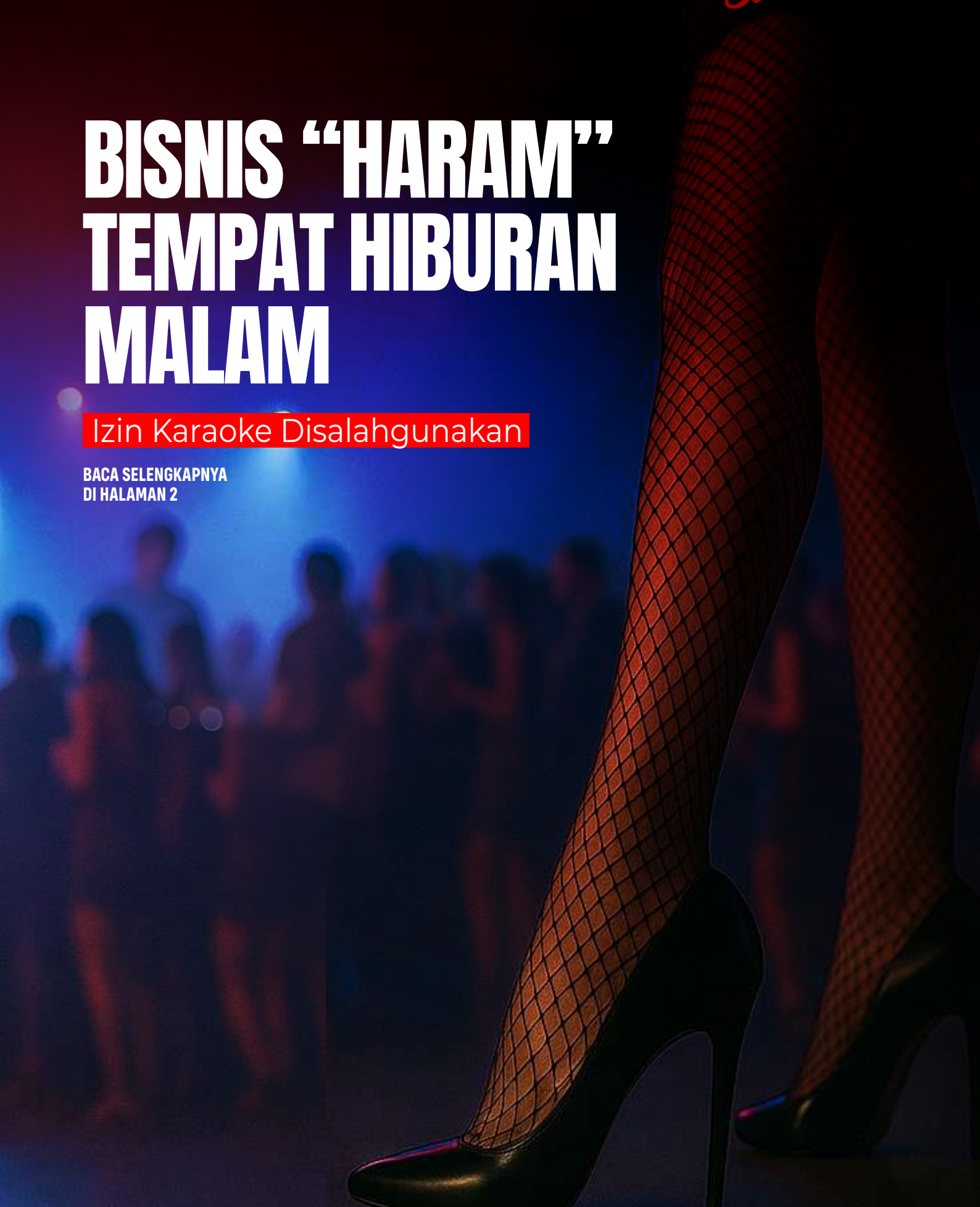




# BISNIS “HARAM” TEMPAT HIBURAN MALAM

Izin Karaoke Disalahgunakan

BACA SELINGKAPNYA  
DI HALAMAN 2





# Remang-remang Bisnis THM

## Kebocoran Pajak Ratusan Juta

**I**NDUSTRI hiburan malam di Bumi Batiwakkal kian menjamur. Puluhan tempat pelepas hasrat kaum 'haus hiburan' itu terus tumbuh seiring makin padatnya penduduk perkotaan hingga kampung.

Saat ini, jumlah penduduk Berau sudah mencapai 300 ribu jiwa. Mereka tak hanya warga ber-KTP Berau, tapi juga yang datang dari berbagai daerah untuk bekerja.

Jumlah itu dinilai sebagai pasar yang menjanjikan dalam industri hiburan. Sayangnya, banyak tempat hiburan malam di Berau hanya mengantongi izin usaha karaoke.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DP-MPTSP) Berau, Nanang Bakran, mengungkapkan, hanya ada 21 tempat hiburan yang punya izin legal, yakni tempat karaoke, yang tersebar di Tanjung Redeb, Teluk Bayur, dan Sambaliung.

Berdasarkan data DPMPSTP, setidaknya ada 11 tempat hiburan yang beroperasi saat malam hari di Tanjung Redeb. Lalu, ada enam THM di Sambaliung empat THM di Teluk Bayur. Di luar 21 tempat hiburan tersebut, maka statusnya ilegal karena tak punya izin.

"Semua tempat itu memiliki izin untuk membuka tempat karaoke saja," kata Nanang awal pekan ini.

Namun, menurut laporan, tempat itu bukan hanya untuk karaoke. Berdasarkan data DPMPSTP selaku pengawas investasi, mereka kerap menerima laporan peredaran minuman beralkohol atau minuman keras secara ilegal.

Selain miras, ada pula laporan perdagangan manusia yang sering masuk di meja kerja Nanang. Menurutnya, laporan itu langsung ditindaklanjuti bersama aparat gabungan.

Sayangnya, entah informasi razia dadakan bocor terlebih dahulu atau memang pengelola sedang beruntung, Nanang menyebut tak pernah menemukan pere-



edaran miras dan perempuan malam di semua titik usaha karaoke tersebut.

Yang jelas, setiap mengikuti razia, semua titik tersebut telah didapati dengan perizinan yang lengkap.

Dia sebut, izin itu diurus melalui Online Submission Sistem

(OSS), aplikasi izin yang terintegrasi langsung ke pemer-

intah pusat. Daerah hanya sebagai penerima pemberitahuan izin dan melakukan pengawasan.

"Izinnya karaoke, tapi memang sering ada laporan yang masuk. Saya pribadi tidak pernah temui miras dijual di sana," ucapnya.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, THM merupakan salah satu objek pajak yang setiap bulannya diwajibkan membayar pajak.

Dari 21 tempat hiburan itu, pemerintah mengumpulkan pajak senilai Rp406 juta. Padahal, potensi yang seharusnya didapatkan mencapai Rp800 juta. Pajak dari THM pun disebut bocor. Banyak pen-

gusaha masih bandel dengan tidak membayar pajak sebesar 40 persen dari nilai laba.

Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie, menyebut, saat ini, para pengelola wajib membayarkan pajak melalui sistem yang termonitor secara online lewat Transaction Monitoring Device (TMD).

Kewajiban itu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Fiskal PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada wajib pajak pelaku usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa.

"Seharusnya bisa lebih karena pajak tidak termonitor dan pelaku usaha tidak tertib, serapannya jadi rendah," kata Djupi.

Tahun ini, dengan adanya penguatan program transaksi pajak daerah dan aturan yang tegas, penerimaan pajak diharapkan meningkat. Angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa naik hingga Rp20 miliar per tahun mulai 2026.

"Peningkatan kepatuhan minimal pada angka 30 persen," harapnya. (\*)



NANANG BAKRAN



DJUPIANSYAH GANIE

# Tempat Hiburan Malam Menjamur

## Waspada Penularan Penyakit Kelamin

**T**EMPAT hiburan malam sangat sulit dipisahkan dari praktik perdagangan manusia. Perempuan maupun laki-laki pemuas nafsu biasa ditemui dalam praktik bisnis hiburan malam, mulai kota besar hingga perkampungan.

Sejurus dengan itu, THM juga berkaitan erat dengan penyebaran penyakit seperti HIV/AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual di luar nikah. Beberapa kelompok pekerja di THM bahkan memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi HIV karena faktor seperti berganti-ganti pasangan seksual tanpa perlindungan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau mencatat, saat ini, terdapat 70 kasus yang ditangani melalui agen kesehatan seperti Puskesmas. Sejak 2024 terdapat 64 kasus dan 66 kasus pada awal 2025, di mana tiga di antaranya merupakan Wanita Pekerja Seks (WPS).

Selain itu, 10 kasus diidap oleh ibu hamil. Lalu, hampir 15 persen dari jumlah kasus merupakan pasangan homoseksual, yakni Laki Suka Laki (LSL) sebanyak 9 kasus.

Wasor P2-HIV Analisis Penyakit Menular Dinas Kesehatan Berau, Andy Nuriyanto, menyebut, pihaknya telah melakukan pemberian obat secara rutin kepada para Orang Dengan HIV (ODHIV). Obat rutin tersebut harus selalu dikonsumsi selama sebulan.

Dalam satu botol, terdapat 30 butir obat yang dikonsumsi sekali dalam sehari. Obat

husus itu dapat memperkecil ruang penyebaran virus di dalam tubuh ODHIV.

"Semua termonitor, terpantau rutin," ucapnya.

Dari kebanyakan kasus, didapati tak semua pasien merupakan warga Berau, melainkan pekerja yang datang dari luar daerah.

Namun, dia meminta jangan ada satupun pihak yang mendiskriminasi penderita ODHIV. Sebab, dalam penangananannya, dibutuhkan dukungan lingkungan agar penderita bisa mengonsumsi obat secara rutin.

Setiap pasien pun dijaga nama baiknya, sehingga data pengidap tak sembarangan disebar-kan demi menjaga mental para pengidap agar bisa kembali ke lingkungan sosialnya.

"Kalau pengidap tak lagi tinggal di Berau, kami tetap bisa memantau. Ada sistem kesehatan yang dibangun untuk memantau kesehatan ODHIV," tuturnya.

Andy menjelaskan, pemeriksaan HIV pada dasarnya dilakukan secara sukarela. Namun bagi kelompok berisiko tinggi, seperti pekerja THM, pemeriksaan dilakukan secara rutin setiap 3-6 bulan.

"Tidak ada pemaksaan. Mereka datang untuk memeriksakan diri, tapi kalau sasarannya kelompok THM, kami wajibkan pemeriksaan rutin," katanya.

Menurut Andy, meningkatnya jumlah kasus tidak selalu menandakan situasi memburuk. Sebaliknya, hal itu bisa menunjukkan masyarakat semakin sadar

pentingnya pemeriksaan dini, sehingga deteksi kasus berjalan lebih optimal.

Lebih lanjut, ia menyebut keberhasilan pengobatan sangat bergantung pada dukungan sosial. Stigma negatif terhadap pengidap HIV/AIDS justru dapat melemahkan semangat penyintas dalam menjalani terapi.

"Terkadang pemberitaan itu hanya menggemborkan jumlah kasus tanpa melihat sisi edukasinya. Padahal, hal seperti itu bisa menjatuhkan mental pasien. Mereka butuh dukungan, bukan stigma," tegasnya.

Andy menjelaskan, HIV memang belum bisa disembuhkan, tetapi dapat dikendalikan dengan terapi antiretroviral yang rutin. Dengan pengobatan teratur, kadar virus dapat ditekan hingga tidak terdeteksi, sehingga pasien tetap bisa hidup sehat dan produktif.

Selain pengobatan, upaya pencegahan juga terus digencarkan. Andy mengingatkan masyarakat untuk menjauhi perilaku seks bebas yang hingga kini masih menjadi faktor utama penularan HIV di Berau.

"Faktor terbesar adalah hubungan sesama jenis dan biseksual, lalu disusul hubungan dengan pekerja seks serta penularan dari pasangan. Pencegahannya sederhana, jangan seks bebas," ujarnya.

Andy menegaskan, pengendalian HIV tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan dan pengobatan, tetapi juga melalui dukungan sosial. Ia berharap, pasien tidak dijauhi dan justru mendapat dukungan agar semangat menjalani pengobatan. (\*)



ANDY NURIYANTO





## Razia THM Masih Tumpul

**P**EREDARAN minuman keras menjadi mimpi buruk bagi masyarakat di Kabupaten Berau. Membasmi peredaran miras sama sulitnya seperti membersihkan hama rumput di ladang subur.

Kepala Satpol PP Berau, Anang Saprani, mengaku kelimpungan mengatasi bisnis haram tersebut karena tak dapat ditekan hanya dengan model razia dan menyita barang bukti miras.

Setiap kali menggelar razia, kata dia, dalam jangka waktu singkat miras tersebut kembali diajakan oleh pengusaha berkedok tempat karaoke.

"Itu sudah sering kami razia, tapi seperti rumput liar. Habis dipotong, tumbuh lagi," kata Anang.

Dia pun membantah bila Satpol PP tidak bekerja. Sebab, dia mengklaim tugas dan fungsi sudah dijalankan.

Pihaknya serius dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

"Tidak bisa juga kami disebut enggak bekerja," tegasnya.

Menurutnya, aturan itu sudah tegas melarang peredaran dan penjualan miras.

Dia juga mengibaratkan penegakan perda miras tersebut seperti larangan korupsi. Karena hingga saat ini banyak oknum yang tetap melakukan praktik korupsi.

Sama halnya dengan ketegasan pemerintah memberantas narkoba, hingga saat ini banyak pengedar yang ditangkap karena kasus tersebut. "Sulit membunuh bisnis ini," imbuhnya.

Anang memastikan, seluruh THM di Berau hanya memiliki izin tempat usaha karaoke. Tidak ada dalam izin tersebut yang memberikan kesepakatan untuk mengedarkan miras, sehingga dipastikan ilegal.



ANANG SAPRANI

"Saya sudah cek di DPMPTSP, izinnya karaoke," ungkapnya.

Di sisi lain, Anang mengeluhkan Satpol PP Berau

mengalami kendala ket-

erbatasan sumber daya manusia (SDM). Bila merujuk Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Satpol PP, seharusnya SDM di daerah minimal 350-500 personel lapangan.

Namun, di Berau saat ini hanya memiliki total 191 personel. Itu pun masih dipangkas dengan struktural badan.

Bila diakumulasi, personel Satpol PP Berau hanya mencapai 140 anggota dan masih dipecah dengan personel yang ditugaskan di setiap kecamatan.

"Jadi kalau dibagi dengan patroli pasti akan sulit," sebutnya.

### JANGAN TANGGUNG-TANGGUNG

Upaya penertiban peredaran miras di tempat hiburan malam pun mendapatkan

sorotan dari Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto. Dia menyebut miras masih dengan bebasnya beredar di Berau tanpa tindakan tegas.

Menurutnya, miras tersebut dapat dikendalikan secara tegas melalui pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang sudah ada. Bahkan, sudah hampir 15 tahun usianya, namun masih "tumpul".

"Namun kenyataannya, di beberapa tempat seperti kios, karaoke, hingga THM berkedok cafe, masih menyediakan miras. Ini tentu tidak sesuai dengan aturan dan melanggar" ujarnya.

Subroto mengatakan, persoalan miras bukan hal sepele karena menyangkut masa depan generasi muda, terutama di wilayah pesisir, tepatnya di Kecamatan Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, dan Kecamatan Bidukbiduk yang cukup rawan.

Bahkan, kata dia, aksi pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, hingga tindak kejahatan lain yang berawal dari minuman keras terjadi di wilayah tersebut.

"Saya jujur khawatir, karena ini menyangkut generasi kita. Jangan sampai mental dan masa depan mereka hancur karena peredaran miras yang tidak terkendali," ungkapnya.

Ia menilai, pelaksanaan perda yang mengatur soal miras perlu benar-benar ditegakkan. Apalagi, perda tersebut masih berlaku dan belum dicabut. Untuk itu, dia meminta pemerintah daerah bisa menjalankan perda itu dengan sebaik-baiknya.

"Kalau sudah ada pembatasan saja masih bisa lolos, apalagi kalau diberi celah untuk membolehkan, tentu akan makin sulit dikendalikan. Jangan tanggung-tanggung," paparnya.

Menurut Subroto, penegakan aturan harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.

"Saya berharap Satpol PP bisa menegakkan aturan itu dengan serius. Kalau memang tidak boleh, ya jangan dibiarkan. Harus disikat habis peredarannya," tegasnya. (\*)



SUBROTO





## Penertiban THM Jangan Tunggu Ada Keributan

**K**EBERADAAN tempat hiburan malam (THM) dan peredaran minuman keras di wilayah Kecamatan Sambaliung kembali menjadi sorotan warga. Meski telah berlangsung lama, masyarakat menilai penegakan hukum terhadap aktivitas tersebut masih minim.

Rudi, warga Kelurahan Sambaliung, mengaku keberadaan THM dan miras bukan hal baru di wilayahnya. Ia menyebut, selama ini, aktivitas tersebut seolah dibiarkan tanpa tindakan berarti dari aparat.

"Kalau di sini asal ke THM-THM pasti ada. Saya tidak tahu harganya berapa, tapi memang sudah lama begitu," ungkapnya, Jumat (8/11/2025).

Rudi menambahkan, selama tinggal di kawasan yang dekat dengan sejumlah THM, dirinya belum pernah menyaksikan gangguan ketertiban seperti perkelahian atau keributan.

Namun, ia berharap aparat tidak menunggu kejadian buruk baru melakukan penertiban.

"Selama ini memang aman-aman saja, tapi kan kita tidak tahu ke depannya. Jangan menunggu ada ribut-ribut baru ditertibkan," tegasnya.

Hal senada diungkapkan warga lainnya, Suparjan, yang menilai peredaran miras jika dibiarkan bebas berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia mencontohkan beberapa kasus kekerasan yang berawal dari konsumsi miras.

"Pasti ada dampaknya. Banyak kejadian penganiayaan dan pembunuhan yang berawal dari miras. Kapan hari itu, di Tepian Teluk Bayur ada penikaman, itu awalnya karena miras," jelasnya.

Meski begitu, Suparjan mengaku tidak merasa terganggu selama keberadaan THM dan peredaran miras tidak menimbulkan keresahan dan masih dalam batas aturan.



Ilustrasi miras di tempat hiburan malam

"Kalau tidak meresahkan ya tidak masalah. Tapi kalau sudah melanggar aturan dan membuat resah warga, harapannya ya ditegasi saja oleh aparat," tegasnya.

Berdasarkan penelusuran media ini, masih banyak tempat hiburan malam berkedok cafe dan karaoke di sejumlah wilayah di Sambaliung yang menjual minuman keras. Adapun harga yang dijual bervariasi, mulai dari kisaran Rp160-200 ribu per botol. Sementara, di kios kaki lima yang beroperasi di Tanjung Redeb berkisar Rp80-100 ribu.

Pada awal Mei 2025, sejumlah ormas di Kecamatan Teluk Bayur menyatakan penolakan terhadap THM berkedok karaoke.

Kala itu, Camat Teluk Bayur, Edi Baskoro, mengatakan, pihaknya sudah melakukan mediasi dengan berbagai instansi terkait dan melibatkan seluruh ketua RT di Kelurahan Teluk Bayur dan Rinding, termasuk pengelola THM.

Saat itu, pihak pengelola beralih sudah mengurus izin melalui OSS. Namun, ketika beroperasi tidak melakukan izin ke pemerintah kecamatan ataupun kelurahan. Hal ini mengundang reaksi dari warga.

"Operasinya seperti sembunyi-sembunyi dan tiba-tiba. Kami di kecamatan tidak tahu

jika tidak ada yang melaporkannya. Harusnya izin dulu, lengkapi semua syaratnya baru beroperasi," jelasnya.

Saat itu, pengelola juga mau melakukan grand opening, namun terkendala dengan izin keramaian yang dikeluarkan oleh Polres Berau.

THM tersebut diduga sudah beroperasi dan gedungnya sudah mempunyai nama. Hanya saja apa aktivitas di dalamnya dirinya belum mengetahui pasti.

Kendati sudah mengurus izin melalui OSS, namun yang dilihat kemudian IMB-nya untuk apa. Apakah untuk karaoke saja atau tempat hiburan malam (THM). Dua hal ini berbeda aktivitasnya dan risikonya pun berbeda.

"Karaoke ini termasuk risikonya sedang dan THM atau klub malam itu resiko tinggi. Dan ini yang harus jelas. Karena saat mediasi kemarin, pengelolanya hanya menunjukkan izin karaoke," jelasnya.

Dirinya juga bertanya kepada pengelola THM, selain aktivitas karaoke apakah ada kegiatan lain lagi. Pengelola saat itu menjawab, selain karaoke ada juga Disc Jockey (DJ) hingga Lady Companion (LC).

"Artinya harus nambah izin lagi bukan hanya karaoke," paparnya. (\*)



# Bayang-bayang Kriminalitas Dipicu Miras

**M**INUMAN keras terus menjadi salah satu pemicu utama gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Data dan laporan kepolisian menunjukkan, konsumsi miras, baik ilegal maupun yang dijual tanpa izin, seringkali menjadi akar dari berbagai tindak kriminal, mulai dari kekerasan hingga kecelakaan lalu lintas.

Salah satu dampak paling nyata dari miras adalah meningkatnya kasus kekerasan dan penganiayaan. Berbagai laporan media dan rilis Polres Berau secara sporadis mencatat kasus-kasus kriminal yang terjadi saat pelaku berada di bawah pengaruh alkohol.

Kasus paling fatal adalah pembunuhan atau penganiayaan berat. Pemuda berinisial A (23) yang membacok orang yang tak dikenal di tepian sungai Segah, Jalan Ahmad Yani, 3 Januari 2023 dini hari. Korban dibacok sebanyak dua kali di bagian leher dan dada menembus jantung hingga meninggal dunia.

Usai membacok, pelaku sempat melarikan diri. Namun, tak sampai 24 jam pencarian, Satreskrim Polres Berau meringkus pelaku di tempat persembunyiannya dalam bengkel di wilayah Kelurahan Rinding. Saat diamankan, pelaku melakukan perlawanan, sehingga petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas.

Dalam rilis pers, pelaku dan korban diketahui dalam pengaruh minuman keras. Keduanya sempat cekcok dan bertengkar, hingga pelaku berlari mengambil senjata tajam yang disimpan di balik jok sepeda motornya untuk membacok korban.

Miras juga menjadi ancaman serius bagi keselamatan di jalan raya. Pengendara yang mabuk adalah sumber utama kecelakaan.

Pada 25 Juli 2024, Kasat Lantas Polres Berau AKP Wulyadi menjadi korban tabrak lari oleh pengendara roda dua saat melaksanakan operasi Patuh Mahakam 2024 di Simpang Empat, Jalan Durian II-Pulau Panjang.

Dalam rekaman video amatir warga, terlihat pengendara motor tersebut nekat



menabrak AKP Wulyadi dan menerobos lampu merah dalam upaya melarikan diri dari penertiban petugas. Pelaku berhasil dihentikan setelah sepeda motornya terguling di jalan.

Akibat insiden ini, AKP Wulyadi mengalami luka memar di pergelangan tangan dan kaki. Menurutnya, pelaku diduga ketakutan karena mengira sedang ada razia. Berdasarkan interogasi, diketahui pelaku berada dalam pengaruh alkohol dan hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.

Pada 22 Maret 2025, seorang pria yang tengah berkendara menggunakan roda dua menjadi korban tabrak lari oleh pengemudi truk di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Sei Bedungun.

Truk dengan nomor polisi KT 8619

GM melaju dengan kecepatan tinggi. Ironisnya, usai menabrak pengemudi motor, sopir truk tak menghentikan laju kendaraannya.

Tak hanya menabrak pengendara roda dua, truk tersebut juga menabrak satu unit mobil dan pagar tembok milik warga di simpang Jalan Pembangunan. Yang berakhir kepala truk terperosok ke dalam parit.

Kasat Lantas Polres Berau, AKP Wulyadi, mengatakan, pelaku tabrak lari tersebut berkendara usai dipengaruhi minuman beralkohol. Hal itu diketahui lantaran aroma mulut sopir truk tersebut tercium aroma alkohol.

"Iya, habis minum sepertinya. Soalnya mulutnya bau alkohol," tegasnya. (\*)

## Kontrol Peredaran Miras Revisi Peraturan Daerah

**M**ENJAMURNYA bisnis dunia hiburan malam tak lepas dari perhatian Pemerintah Kabupaten Berau. Apalagi, sebagai daerah tujuan wisata, wisatawan yang datang ke Berau juga mencari tempat untuk melepas penat.

Melihat kondisi tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengaku tak tutup mata. Ia sadar, pertumbuhan penduduk berjalan beriringan dengan geliat bisnis hiburan malam. Hal itu menambah kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan minuman beralkohol secara lebih masif.

Dia menyebut hal ini sebagai fenomena yang terjadi ketika Berau sedang menggalakkan program penguatan daerah tujuan wisata yang sejatinya menjadi tempat bagi wisatawan berlibur.

Sebagai daerah wisata, menurutnya tak bisa ditepis kebutuhan wisatawan mencari tempat untuk melepas penat. Oleh karenanya, bisnis hiburan malam makin menjamur di Bumi Batiwakkal.

Sadar akan geliat itu, pemerintah pun bergegas memastikan THM di Berau tumbuh dalam pengawasan. Pemerintah mesti turun tangan mengurus peredaran miras.

"Hanya tempat-tempat khusus yang diperbolehkan," tegas Bupati Berau dua periode itu.

Dirinya menyadari, aturan yang diberlakukan saat ini di Berau justru membuat gerak penertiban semakin tidak karuan. Sebab, pemerintah justru lebih sering kecolongan oleh oknum-oknum yang bermain dari bisnis malam tersebut.

Dia menyebut, diperlukan langkah holistik untuk menertibkan bisnis itu, termasuk memperbaiki narasi aturan yang tercantum dalam perda pelarangan peredaran minuman beralkohol.

Revisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol menjadi langkah konkret untuk membenahi masalah tersebut. Sehingga, ke depan langkah petugas maupun para pengusaha dapat sinergi dan tak melaku-



kan tindakan yang melanggar aturan pemerintah.

"Ini yang akan dievaluasi, semoga bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat," katanya.

Nantinya, dalam aturan baru, klasifikasi bisnis dibuat tegas. Tak ada lokasi tempat hiburan dengan status abu-abu. Sehingga, dalam setiap penertiban, pelaku usaha dapat menunjukkan identitas usaha secara lengkap dan tak keliru dalam pengoperasiannya.

"Kita tidak bolehkan itu, tapi dikontrol. Kami memahami bahwa ini adalah kebutuhan," sebutnya.

Dirinya juga menyinggung keberadaan oknum yang pasang badan untuk usaha ilegal. Menurutnya, langkah itu tak perlu dilakukan karena akan bersinggungan dengan keseriusan pemerintah dalam memberantas peredaran miras di Bumi Batiwakkal.

"Karena ulanya, rumah tangga bisa hancur," ucapnya.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menegaskan pentingnya penegakan perda terkait peredaran minuman keras di Berau.

Perda tersebut masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum, sehingga wajib dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait.

Menurut kacamata Komisi II, perda itu

sudah menjadi keputusan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Perda ini pun masih berlaku dan belum dicabut ataupun direvisi.

"Selagi belum ada perubahan, maka semua pihak harus bisa memaksimalkan pola penegakan perda ini," tegas Rudi.

Ia juga menyayangkan, masih maraknya peredaran miras di Berau, terutama di tempat-tempat yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan.

Rudi menekankan, perda sudah mengatur jelas, hanya hotel berbintang lima yang diperbolehkan menjual miras di Bumi Batiwakkal.

"Kalau keberadaannya di kios, warung kaki lima, atau tempat karaoke, itu sudah jelas melanggar. Satpol PP dan instansi terkait harus melakukan penegakan hukum yang lebih tegas," ujarnya.

Rudi menambahkan, apabila pemerintah daerah tidak mampu menegakkan aturan yang ada, maka perlu dilakukan pengaturan ulang, termasuk mengatur pola peredaran miras agar tidak menimbulkan kebebasan tanpa kendali.

"Kalau memang pemerintah daerah tidak bisa menegakkan perda secara maksimal, ayo kita atur. Jangan dibiarkan seperti sekarang, miras yang seharusnya hanya boleh dijual di hotel bintang lima, malah banyak ditemukan di warung kaki lima," katanya.

**BACA SELENGKAPNYA DI HALAMAN 8**



RUDI MANGUNSONG



Menurutnya, perda tersebut harus memiliki roadmap yang jelas agar pelaksanaannya terarah dan tidak multitafsir. Ia juga menolak pandangan sektor wisata harus didukung dengan peredaran miras.

Menurutnya, hal ini tidak boleh diseederhanakan, seolah orang berwisa-ta harus mencari miras.

“Daya tarik destinasi wisata kita itu ada pada keindahan dan kepuasan yang jauh lebih bernilai daripada sekadar minuman keras,” tegasnya.

Rudi juga menyinggung kemungkinan revisi perda apabila pemerintah daerah memang tidak mampu melaksanakan penegakan hukum dengan baik.

“Kalau pemerintah daerah mau merevisi perda, kita siap duduk bersama. Tapi kalau tidak bisa menegakkan, ayo kita atur kembali mekanismenya,” ujarnya.

Namun ia menegaskan, pengaturan ulang perda tidak berarti pemerintah mengambil keuntungan dari pajak atau retribusi miras.

Pemerintah bisa menaikkan PAD dari hotel, restoran, dan tempat hiburan

malam, bukan dari pajak mirasnya. “Efek dominonya yang kita ambil,” imbuhnya.

Rudi menyebut fakta di lapangan bahwa peredaran miras di Berau masih sangat mudah ditemukan. Bahkan, mayoritas semua jenis miras bisa ditemukan di Berau tanpa harus membeli dari hotel bintang lima.

“Jujur saja, mau merek apa pun, mau harga berapa pun, semua ada di Berau. Ini bukti bahwa perda kita belum ditegakkan maksimal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, sempat melemparkan bola panas ke pemerintah daerah agar meninjau kembali Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasalnya, aturan yang sudah berusia 15 tahun itu dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan.

Menurut Dedy, perda ini sebenarnya hanya membolehkan miras beredar di hotel berbintang lima. Masalahnya, di Berau belum punya hotel berbintang lima.

“Akhirnya, miras malah menjamur di tempat-tempat yang seharusnya tidak bisa menjual,” kata Dedy.

Dia menyebut, perda tersebut justru menjadi aturan setengah hati. Mau melarang, tapi celahnya besar. Mau mengatur, tapi pelaksanaannya tak terkendali. Alhasil, perda ini menjadi aturan tidak efektif.

“Kalau memang mau dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), ya harus jelas aturannya. Begitu juga penegakannya,” ucapnya.

Dedy menambahkan, Pemkab Berau sebaiknya segera menentukan sikap. Benar-benar ingin melarang peredaran miras atau justru mengelolanya agar memberi kontribusi resmi bagi kas daerah.

“Kalau memang benar-benar tidak boleh beredar, ya buat lebih tegas. Tapi kalau tidak, lebih baik dikunci sekalian supaya tidak menimbulkan masalah di masyarakat,” tegasnya.

Aturan lama yang sudah usang ini kini ibarat pintu tanpa kunci. Mudah dilanggar, tapi tetap disebut tertutup. Apakah Pemkab Berau berani memperbaiki regulasi atau biarkan miras terus ‘nongkrong’ bebas di tempat-tempat tidak termasuk dalam hotel berbintang. (\*)



DEDY OKTO



## Rene Matcha:

# Usaha Kenalkan Teh Hijau di Tengah Persaingan Coffee Shop

**D**I tengah maraknya kedai kopi di Berau, muncul satu nama yang membawa aroma dan warna berbeda: Rene. Bukan kopi, melainkan matcha, teh hijau khas Jepang yang kini mulai digemari anak muda.

Bagi Firda Zakia, salah satu pendiri Rene, perjalanan ini berawal dari kecintaannya pada teh sejak lama.

"Aku dari dulu tea person, bukan coffee person," ujarnya sambil tersenyum.

Sejak SMA, Firda sudah bermimpi memiliki tea house sendiri. Saat kuliah, tren green tea mulai populer, dan dari situlah ia mengenal matcha.

"Sejak kenal matcha, aku gak pernah nyobain minuman lain. Teman-temanku pun udah hafal pesenanku selalu matcha," kenangnya.

Inspirasi untuk membuka kedai matcha muncul saat Firda melihat acara local market di Jakarta bernama Bright Spot, yang menampilkan berbagai brand lokal termasuk specialty matcha bernama Hakuji.

"Waktu itu aku cuma lihat di story Instagram, tapi langsung tertarik banget. Dari situ aku mulai ngikutin perkembangan matcha dan ngulik tentang dunia matcha," ceritanya.

Kesempatan datang ketika rekan sekaligus partner bisnisnya, Riskianis Edwar, menawarkan tempat untuk dijadikan usaha.



"Waktu itu aku pikir, semua orang di Berau kan suka kopi. Belum ada yang matcha. Jadi kenapa gak aku coba?" katanya.

Meski di tengah gempuran coffee shop baru, Rene justru mendapat sambutan positif.

"Banyak orang yang awalnya bilang gak suka matcha, tapi setelah coba di Rene, jadi suka. Jadi kami yakin, matcha punya pasar sendiri," ujarnya.

Untuk memahami cita rasa matcha sesungguhnya, Firda bahkan terbang ke Jakarta dan berkeliling mencicipi matcha dari berbagai kedai.

"Pas nyoba matcha di luar, aku langsung kayak mind blown. Rasanya rich banget, berlapis ada kacangnya, creamy, sedikit pahit tapi nikmat. Aku langsung bilang ke diri sendiri, ini harus aku bawa ke Berau," ujarnya penuh semangat.

Rene pertama kali diperkenalkan ke publik pada 12 Januari 2025, melalui ajang Car Free Day (CFD) di Berau.

Sambutan positif dari masyarakat membuat tim kecil yang terdiri dari Firda Zakia, Riskianis Edwar, Annisa Amalia, dan Adit semakin yakin untuk melangkah.

Hanya dua bulan berselang, mereka resmi membuka kedai Rene pada Maret 2025, tepat di bulan Ramadan.

Nama "Rene" sendiri memiliki filosofi mendalam. Terinspirasi dari kata renaissance yang berarti kebangkitan atau pembaharuan, nama ini dipilih sebagai simbol awal baru dalam perjalanan mereka.

"Kami ingin Rene jadi titik awal dari sesuatu yang baru," jelas Firda.

Menariknya, pilihan warna Rene hi-

jau, merah, dan kuning juga sarat makna. Hijau melambangkan bumi yang kokoh, merah sebagai simbol semangat dan keberuntungan, sementara kuning diartikan sebagai kemakmuran.

"Kami ingin Rene tetap kokoh, penuh semangat, dan membawa keberuntungan untuk semua," katanya.

Konsep kedai Rene memang berbeda dari coffee shop pada umumnya. Nuansa hangat dan homie langsung terasa sejak pertama kali masuk. Kursi dan meja yang berbeda-beda justru menciptakan kesan organik dan santai.

"Aku pengen Rene terasa seperti rumah. Aku suka nongkrong, dan dari dulu selalu suka tempat yang nyaman dan terasa hidup," ungkap Firda.

Tantangan Menjaga Kualitas Matcha Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Salah satu tantangan terbesar adalah ketersediaan bahan baku.

"Pertengahan tahun kemarin, matcha dari Jepang sempat langka sampai tiga bulan. Jadi kita sempat kesulitan. Tapi kami tetap berusaha cari alternatif dengan powder premium agar bisnis tetap jalan," jelasnya.

Bagi Firda, Rene bukan hanya tentang matcha, tapi tentang menghadirkan pengalaman. Ia berharap Rene bisa menjadi ruang yang menenangkan sekaligus wadah kreatif bagi masyarakat Berau.

"Aku pengen Rene jadi tempat orang nyaman nongkrong, menikmati kesendiriannya, tapi juga bisa jadi ruang kolaborasi. Tempat bertemu ide, produk, dan orang-orang kreatif," tutupnya.

(DINI DIVA APRILIA)



## Inflasi 1,78 Persen Karena Harga Ikan Naik

**B**PS Berau mencatat inflasi pada bulan Oktober secara year-on-year (y-on-y) sebesar 1,78 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,23.

“Inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran,” kata Kepala BPS Berau, Yudi Wahyudin, dalam keterangan resminya.

Kelompok pengeluaran yang paling besar disumbang oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya, sebesar 9,48 persen dengan indeks 119,25.

Secara mendetail, komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi, yaitu emas perhiasan sebesar 0,53 persen.

Kemudian, ikan layang atau ikan benggol 0,15 persen, beras 0,18 persen, udang basah 0,15 persen, sigaret kretek mesin (skm) 0,12 persen, ikan bandeng atau ikan bolu 0,11 persen.

Kemudian kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran mengalami inflasi y-on-y sebesar 3,63 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 104,04 pada Oktober 2024 menjadi 107,82 pada Oktober 2025.

Ombak Tinggi Bikin Pasokan Berkurang

Terpisah, sejumlah pedagang ikan mengungkapkan penyebab harga ikan di Berau naik.

Edi, salah satu pedagang ikan di Jalan Manunggal Tanjung Redeb menjelaskan, saat ini sedang terjadi musim ombak atau bulan janda.

Dia menjelaskan, bahwa bulan janda



adalah ketika para nelayan takut untuk melaut, karena tingginya ombak bisa menyebabkan nelayan terkena lemparan ombak dan tenggelam ketika menjaring ikan.

Akibatnya, pasokan ikan ke lapak-lapak menjadi terbatas. Hal itu memengaruhi harga jual para pedagang ikan.

“Kebetulan bulan ini kan laut lagi musim ombak. Ada namanya bulan desember bulan januari, kebetulan ini bulan janda”, ungkap Edi, Jumat (7/11).

“Permintaan banyak stok sedikit harganya melambung tinggi, meskipun enggak terlalu tinggi, ya sedang-sedang ajalah. Biasanya layang normalnya Rp 45 ribu, Rp 40 ribu sekarang jadi Rp 50 ribu, nelayannya agak kurang dapat kan”, sambungnya.

Edi menjelaskan, bahwa kondisi pemasok ikan di Berau terlampau kurang,

maka ikan akan dikirim dari Bontang, Tarakan, dan Balikpapan.

Di musim ombak seperti sekarang ini, ikan yang paling banyak ditangkap adalah ikan yang ditangkap dari muara, seperti ikan bandeng, ikan nila, ikan patin, ikan baung, ikan salap, dan udang-udang sungai.

Adapun ikan laut seperti ikan tongkol, ikan tuna, ikan putih, ikan layang agak berkurang.

Pedagang ikan lainnya yakni Irwan juga mengungkapkan kenaikan harga ikan. Menurut Irwan ada banyak faktor yang menyebabkan kenaikan harga ikan, mulai dari cuaca hingga tenggelamnya kapal.

“Karena gelombang ini. Di Talيسان kan ada kapal yang tenggelam, bulan terang, sama cuaca di laut”, kata Irwan. (\*)

## 312.032 Turis Kunjungi Berau

**K**EPALA Disbudpar Berau, Ilyas Natsir, menyampaikan bahwa capaian pelaksanaan event pariwisata di Kabupaten Berau sepanjang tahun 2025 telah mencapai sekitar 90 persen.

Menurutnya, meskipun sebagian besar kegiatan sudah terlaksana dengan baik, masih ada beberapa agenda yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun.

Beberapa event yang akan digelar antara lain Expo dan Promosi Pariwisata, Biduk-Biduk Run, serta Maratua Music Festival yang menjadi salah satu daya tarik utama di kawasan wisata bahari Berau.

“Secara umum capaian event tahun ini sudah sangat baik, sekitar 90 persen dari total agenda pariwisata yang direncanakan sudah berjalan. Hanya saja memang masih ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan di akhir tahun,” ungkap Ilyas.

Meski demikian, Ilyas Natsir menyampaikan ada beberapa kegiatan yang dibatalkan seperti halnya festival Manu-

tung Jukut.

Tak hanya itu, kegiatan Pawai Budaya, yang juga merupakan salah satu agenda tahunan dalam kalender event pariwisata Berau, belum dilaksanakan tahun ini.

Hal tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah, sehingga beberapa kegiatan harus ditunda atau disesuaikan pelaksanaannya.

Namun dia memastikan Disbudpar Berau terus berupaya mendorong kegiatan promosi yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Hingga September 2025, jumlah kunjungan turis ke Berau tercatat mencapai 312.032 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.635 merupakan turis asing, sedangkan 308.397 merupakan wisatawan nusantara.

“Angka ini menunjukkan tren positif, di mana minat wisatawan untuk berkunjung ke Berau masih cukup tinggi. Kita berharap hingga akhir tahun jumlah kunjungan bisa terus meningkat, terutama den-



ILYAS NATSIR



gan adanya beberapa event yang masih akan digelar,” ujar Ilyas.

Lebih jauh, Ilyas Natsir menyampaikan pihaknya terus berkomitmen untuk memperkuat promosi wisata dan melestarikan budaya lokal.

Berbagai kegiatan yang digelar diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, terutama pelaku UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Setiap event yang kami laksanakan selalu melibatkan pelaku usaha lokal, seniman, serta komunitas masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan secara langsung. Kami ingin pariwisata Berau terus berkembang dan menjadi salah satu penopang ekonomi daerah,” tutupnya. (DINI DIVA APRILIA)



**Berau Terkini**  
tak berhenti

#### DIREKSI

**Komisaris** : M. Syaifuddin Zuhrie  
**Direktur** : Rengkuh Enggalingtyaz, **Digital Marketing Manager** : Aidil Anugrah, **Iklan** : Siti Nur Ariska, **Admin** : Tariska Ramadayani

**Advokat & Konsultan Hukum** : Firma Hukum H.A.M & Partner

**Email Redaksi** : berauterkini2023@gmail.com, **Iklan dan informasi** : berauterkini2023@gmail.com  
**Alamat Redaksi** : Ruko Komplek Perumahan Berau Indah, **Telepon** : 0851-6366-0045

#### SUSUNAN REDAKSI

**Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi** : Robithoh Johan Palupi,  
**Koordinator Liputan** : Rusdiyono, **Editor** : Maulana Ilhami Fawdi, **Reporter** : Sulaiman, Hendra Irawan, Dini Diva, Nadya Zahira, **Grasis** : Surya Adji Permana,  
**Media Sosial** : Siti Nur Ariska, **IT & Web Development** : Fathurrohman.